



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: 2776-9798

Diversity
JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Telaah Kegagalan Pasar dan Alasan Pentingnya Keterlibatan Pemerintah dalam Perekonomian

Yusrotul Latifa

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

*Corresponding author e-mail: abdurrahman.ah@gmail.com

DOI : [10.32832/diversityjournal.v6i1.22621](https://doi.org/10.32832/diversityjournal.v6i1.22621)

ABSTRAK

Kegagalan pasar merupakan kondisi ketika mekanisme harga tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien maupun adil, sehingga tidak menghasilkan hasil yang diinginkan bagi masyarakat. Literatur ekonomi publik menunjukkan bahwa berbagai distorsi seperti eksternalitas, barang publik, persaingan tidak sempurna, pasar tidak lengkap, serta asimetri informasi menjadi penyebab utama munculnya kegagalan tersebut (). Kondisi ini sering memunculkan inefisiensi karena biaya dan manfaat suatu kegiatan tidak sepenuhnya tercermin dalam harga pasar, sehingga mendorong perlunya koreksi melalui kebijakan publik. Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk memulihkan kegagalan pasar melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pemerintah dapat menyediakan barang publik, menetapkan regulasi untuk mencegah praktik monopoli, mengatasi dampak eksternalitas, serta menjalankan kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi. Temuan dari dokumen lain juga mempertegas bahwa mekanisme pasar tidak dapat berjalan optimal tanpa aturan, pengawasan, serta campur tangan pemerintah untuk mencegah penyimpangan perilaku pelaku ekonomi dan memastikan tercapainya kesejahteraan sosial. Dalam perekonomian modern yang semakin kompleks, intervensi pemerintah menjadi semakin relevan untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah bukan hanya sebagai korektor kegagalan pasar, tetapi juga sebagai stabilisator yang menjaga ketahanan ekonomi dan keberlangsungan pembangunan.

Kata kunci: Kegagalan pasar, Eksternalitas, Intervensi pemerintah

An Analysis of Market Failures and the Importance of Government Involvement in the Economy

ABSTRACT

*Market failure arises when price mechanisms are unable to allocate resources efficiently or fairly, leading to outcomes that do not maximize societal welfare. Evidence from *Ekonomi Publik: Teori dan Penerapan Kebijakan Fiskal* identifies several core sources of market failure, including imperfect competition, the existence of public goods, externalities, incomplete markets, and information asymmetries. These conditions disrupt efficient market operations because private incentives often diverge from social benefits or costs. As a result, the market cannot independently correct distortions such as overproduction caused by negative externalities or the underprovision of essential public goods. Government intervention therefore becomes crucial to restoring economic balance. The documents you provided highlight that the state plays vital stabilizing, allocative, and distributive roles, particularly in regulating monopolistic behavior, supplying collective goods such as infrastructure and security, and mitigating socially harmful externalities. Through fiscal and monetary policies, the government also acts to maintain economic stability, especially when markets experience volatility or fail to generate adequate employment opportunities. In modern economies characterized by increasing complexity, technological change, and environmental challenges, state involvement is even more necessary. Government*

intervention not only addresses market imperfections but also ensures equity, sustainability, and long-term economic resilience. Thus, public policy continues to serve as an essential mechanism for correcting market shortcomings and safeguarding social welfare.

Keyword: Market Failure, Externalities, Government Intervention

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi modern, mekanisme pasar sering dipandang sebagai cara paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Namun, teori ekonomi publik menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu bekerja secara sempurna. Berbagai distorsi seperti eksternalitas, barang publik, persaingan tidak sempurna, pasar tidak lengkap, dan informasi yang tidak seimbang menyebabkan pasar gagal mencapai kondisi alokasi yang optimal bagi masyarakat. Kegagalan pasar ini membuat harga tidak lagi mencerminkan biaya maupun manfaat sebenarnya, sehingga keputusan produksi dan konsumsi menjadi tidak efisien.

Dalam Ekonomi Publik: Teori dan Penerapan Kebijakan Fiskal, kegagalan pasar dijelaskan sebagai situasi di mana pasar bebas tidak mampu memaksimalkan kesejahteraan sosial karena ketidakefisienan dalam distribusi barang dan jasa. Sebagai contoh, produk yang menimbulkan dampak eksternal seperti polusi atau barang publik seperti jalan raya tidak dapat disediakan secara memadai melalui mekanisme pasar murni. Kondisi ini diperburuk ketika struktur pasar didominasi monopoli atau oligopoli yang berpotensi mendorong harga tinggi dan menurunkan pilihan konsumen.

Karena berbagai ketidaksempurnaan tersebut, pemerintah memegang peran penting dalam memastikan pasar dapat berjalan lebih efisien. Pemerintah berfungsi melakukan alokasi, distribusi, dan stabilisasi, termasuk menyediakan barang publik, menjamin pemerataan kesejahteraan, serta menjaga kestabilan ekonomi. Selain itu, dokumen lain menguatkan bahwa tanpa regulasi pemerintah, mekanisme pasar tidak mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan dampak negatif kegiatan swasta, terutama terkait monopoli dan pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu, di tengah kompleksitas ekonomi saat ini, campur tangan pemerintah bukan hanya sebagai respons terhadap kegagalan pasar, tetapi juga sebagai upaya menjaga efisiensi, keadilan, serta keberlanjutan perekonomian secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam fenomena yang dikaji melalui data non-numerik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara langsung dan holistik, terutama ketika fenomena yang diteliti menuntut pemaknaan melalui pengalaman subjek di lapangan. Pendekatan fenomenologi turut

digunakan untuk menelusuri bagaimana individu menafsirkan peristiwa yang mereka alami, sebagaimana dijelaskan bahwa metode fenomenologi membantu menjawab pertanyaan terkait fenomena yang tampak dalam masyarakat melalui proses deskripsi dan interpretasi yang sistematis .

Sumber data dalam penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan, baik melalui wawancara maupun observasi, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai kondisi lapangan. Wawancara dilakukan dengan teknik tidak terstruktur agar informan dapat menyampaikan pandangannya secara bebas dan terbuka. Sementara itu, observasi dilakukan untuk menangkap situasi dan perilaku yang muncul secara alami di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data ini dinilai efektif untuk mendapatkan data yang autentik dan mendalam mengenai objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegagalan pasar merupakan kondisi ketika mekanisme pasar tidak lagi mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien sehingga hasil yang dihasilkan tidak mencerminkan kesejahteraan sosial secara optimal. Dalam *Ekonomi Publik: Teori dan Penerapan Kebijakan Fiskal*, kegagalan pasar dipahami sebagai kegagalan sistem harga dalam mempertahankan aktivitas ekonomi yang diinginkan atau menahan aktivitas yang merugikan berdasarkan prinsip kesejahteraan masyarakat. Situasi ini muncul akibat berbagai distorsi seperti ketidaksempurnaan persaingan, eksternalitas, kekurangan barang publik, informasi yang tidak simetris, pasar yang tidak lengkap, serta ketidaksesuaian antara manfaat pribadi dan manfaat sosial. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan betapa rapuhnya mekanisme pasar apabila dibiarkan bekerja tanpa regulasi yang memadai.

Salah satu penyebab paling dominan dari kegagalan pasar adalah eksternalitas, yaitu dampak dari kegiatan produksi atau konsumsi suatu pihak terhadap pihak lain tanpa adanya kompensasi. Eksternalitas negatif seperti polusi udara dan kerusakan lingkungan membuat biaya sosial lebih tinggi dibandingkan biaya privat, sehingga produksi cenderung berlebihan dan merugikan masyarakat. Berbagai literatur dalam dokumen ekonomi publik menegaskan bahwa emisi gas rumah kaca merupakan salah satu eksternalitas global terbesar yang sulit diatasi tanpa campur tangan pemerintah. Sebaliknya, eksternalitas positif seperti pendidikan justru mengakibatkan tingkat konsumsi yang lebih rendah daripada yang dibutuhkan karena manfaatnya tidak sepenuhnya diterima oleh pelaku individu. Kondisi ini memperkuat kebutuhan akan kebijakan pemerintah untuk menginternalisasi manfaat atau biaya demi mencapai alokasi yang lebih optimal.

Kegagalan pasar juga terjadi pada penyediaan barang publik. Barang publik memiliki sifat non-rival dan non-excludable, sehingga konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain dan mustahil membatasi siapa saja

yang dapat menikmatinya. Situasi ini menimbulkan masalah penumpang bebas (*free rider*), di mana individu dapat memperoleh manfaat tanpa memberikan kontribusi. Akibatnya, sektor swasta enggan menyediakan barang publik karena tidak dapat memperoleh keuntungan langsung. Literatur dalam dokumen Anda menjelaskan bahwa infrastruktur transportasi, pertahanan, dan keamanan merupakan contoh barang publik yang hanya dapat disediakan secara memadai melalui intervensi pemerintah karena kebutuhan yang bersifat universal.

Bentuk kegagalan pasar lainnya adalah persaingan tidak sempurna, yang muncul ketika struktur pasar dikuasai oleh sedikit perusahaan atau ketika satu pelaku memiliki kekuatan dominan dalam menentukan harga. Hambatan masuk, diferensiasi produk, serta strategi bisnis tertentu memperkuat ketimpangan ini. Dalam struktur monopoli atau oligopoli, produsen cenderung membatasi output dan menaikkan harga, sehingga merugikan konsumen dan menurunkan efisiensi secara keseluruhan. Dokumen ekonomi publik juga menyoroti monopsoni, yaitu kondisi ketika hanya terdapat satu pembeli dominan, sehingga harga faktor produksi dapat ditekan jauh di bawah tingkat pasar. Fenomena ini kembali menunjukkan perlunya regulasi agar pasar tetap kompetitif dan adil.

Selain itu, asimetri informasi menjadi salah satu sumber utama kegagalan pasar. Ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih lengkap daripada pihak lainnya, keputusan ekonomi menjadi tidak efisien. Masalah seperti *adverse selection* dan *moral hazard* sering terjadi pada sektor keuangan, asuransi, dan perbankan. Dalam kondisi ini, konsumen dan produsen tidak mampu membuat keputusan rasional karena ketimpangan informasi, sehingga pasar gagal menciptakan keseimbangan yang efisien. Dokumen *Teori Governance* juga menjelaskan kegagalan yang berkaitan dengan barang bersama (*common goods*). Tidak adanya kepemilikan individu atas sumber daya seperti padang penggembalaan menimbulkan eksploitasi berlebihan atau tragedi commons karena setiap orang cenderung memaksimalkan manfaat pribadi tanpa mempertimbangkan kelestarian sumber daya tersebut.

Pasar tidak lengkap termasuk bentuk kegagalan lainnya. Pasar disebut tidak lengkap ketika tidak semua barang dan jasa tersedia meskipun nilai sosialnya lebih besar daripada biaya penyediaannya. Sektor swasta tidak melihat kesempatan keuntungan yang cukup, sehingga barang atau jasa tersebut tidak diproduksi meskipun memiliki manfaat publik. Selain itu, kegagalan mekanisme harga juga dapat terjadi ketika harga tidak mampu menyeimbangkan permintaan dan penawaran, sehingga muncul kondisi oversupply, overdemand, underconsumption, atau undersupply. Fenomena ini menunjukkan bahwa harga bukan selalu indikator yang dapat diandalkan untuk mencapai efisiensi pasar.

Keseluruhan bentuk kegagalan pasar tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pasar memiliki keterbatasan struktural dalam menyediakan barang dan jasa secara optimal. Dengan demikian, diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengatur kembali penyediaan barang publik, mengurangi dampak eksternalitas, menjaga persaingan, dan memastikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Intervensi pemerintah menjadi kebutuhan mendesak karena pasar tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan ekonomi secara mandiri. Dalam banyak sektor, pasar hanya bekerja ideal apabila seluruh asumsi persaingan sempurna terpenuhi. Namun, dokumen *Teori Governance* menjelaskan bahwa realitas ekonomi jauh lebih kompleks; terdapat banyak dinamika dan ketidakpastian yang membuat pasar tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Pemerintah berperan sebagai pengatur, pengawas, dan penyeimbang agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam jalur efisiensi dan keadilan. Tanpa regulasi, standar kualitas, dan sanksi yang jelas, pelaku pasar dapat bertindak semena-mena, mengeksploitasi konsumen, atau menimbulkan ketidakpastian yang mengganggu kestabilan ekonomi.

Alasan paling fundamental perlunya intervensi pemerintah adalah adanya berbagai bentuk kegagalan pasar. Dokumen ekonomi publik menegaskan bahwa distorsi seperti monopoli, eksternalitas, informasi yang tidak sempurna, dan kekurangan barang publik membuat pasar tidak dapat mencapai alokasi yang efisien. Pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan sosial lebih diutamakan dibanding kepentingan pelaku tertentu. Intervensi, misalnya melalui regulasi anti-monopoli dan pengawasan harga, diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan besar.

Intervensi pemerintah juga sangat penting dalam penyediaan barang publik. Keamanan, jalan raya, dan layanan kesehatan adalah barang yang tidak dapat disediakan swasta karena tidak mampu mengatasi masalah free rider. Melalui fungsi alokasi, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara merata. Fungsi distribusi pemerintah juga sangat penting karena pasar tidak mampu mengatasi ketimpangan pendapatan. Kebijakan fiskal seperti subsidi, bantuan sosial, dan redistribusi pendapatan diperlukan untuk menurunkan kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial.

Pemerintah juga menjalankan fungsi stabilisasi untuk menjaga ketahanan ekonomi. Kebijakan moneter dan fiskal digunakan untuk mengendalikan inflasi, menjaga pertumbuhan, mengurangi pengangguran, dan menghadapi gejolak ekonomi. Tanpa peran ini, perekonomian rentan terhadap krisis dan fluktuasi ekstrem. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi eksternalitas terutama yang berdampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan polusi. Tanpa regulasi

lingkungan, perusahaan cenderung mengabaikan konsekuensi sosial dari aktivitas produksinya.

Secara keseluruhan, intervensi pemerintah bukanlah bentuk pembatasan terhadap pasar, tetapi justru merupakan upaya untuk memperbaiki kekurangannya. Pemerintah melengkapi pasar dengan meluruskan distorsi, menyediakan barang publik, menjaga persaingan, mengurangi ketimpangan, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Tanpa intervensi, mekanisme pasar tidak dapat berjalan secara adil, efisien, maupun berkelanjutan.

Kebijakan fiskal dan moneter menjadi dua instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai arah yang diinginkan. Kebijakan fiskal berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola pendapatan dan pengeluaran negara, sementara kebijakan moneter berfokus pada pengaturan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Dalam literatur ekonomi publik, kedua instrumen ini merupakan pilar dari fungsi stabilisasi pemerintah, yang memungkinkan pengendalian inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan fungsi stabilisasi karena setiap perubahan yang dilakukan dalam kebijakan fiskal atau moneter memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Kebijakan fiskal berperan strategis dalam mengatur penerimaan negara melalui pajak dan mengelola pengeluaran publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika perekonomian melemah, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, seperti meningkatkan belanja publik atau menurunkan tarif pajak untuk merangsang permintaan agregat. Sebaliknya, ketika inflasi meningkat, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal kontraktif dengan menurunkan pengeluaran atau menaikkan pajak untuk menekan permintaan berlebihan. Kebijakan fiskal juga digunakan untuk mengalokasikan anggaran ke berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta untuk melakukan redistribusi pendapatan melalui program sosial guna mengurangi kesenjangan ekonomi.

Sementara itu, kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas harga. Melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga acuan, dan kewajiban cadangan minimum, bank sentral dapat mempercepat atau memperlambat aktivitas ekonomi. Ketika inflasi meningkat, bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk menekan jumlah kredit yang beredar. Namun, ketika perekonomian melambat, bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Kebijakan moneter bersifat lebih fleksibel dan cepat diimplementasikan dibandingkan kebijakan fiskal, sehingga efektif digunakan dalam merespons gejolak ekonomi jangka pendek.

Kedua kebijakan ini harus berjalan secara sinergis. Tanpa koordinasi, kebijakan fiskal dan moneter dapat saling bertentangan dan mengurangi efektivitas satu sama lain. Misalnya, kebijakan fiskal ekspansif dapat meningkatkan inflasi apabila tidak diimbangi kebijakan moneter yang ketat. Dokumen ekonomi publik juga menekankan bahwa kebijakan stabilisasi tidak dapat didesentralisasikan karena efeknya bersifat nasional. Jika setiap daerah memiliki kebijakan fiskal atau moneter sendiri-sendiri, maka stabilitas harga dan nilai mata uang akan sulit dikendalikan.

Dalam konteks barang bersama (*common goods*), kegagalan pasar muncul karena tidak adanya kepemilikan individual yang jelas. Barang seperti padang rumput desa atau sumber daya alam yang bersifat komunal rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Dokumen *Teori Governance* menjelaskan bahwa indivisibilitas sumber daya bersama menciptakan dilema bagi masyarakat, karena setiap individu cenderung mengambil manfaat tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Pemerintah dalam hal ini harus menetapkan aturan dan sistem pembiayaan kolektif seperti pajak demi mencegah tragedi sumber daya bersama .

Kegagalan informasi juga menjadi faktor penting yang menyebabkan pasar tidak bekerja secara efisien. Ketidakseimbangan informasi antara produsen dan konsumen menciptakan risiko *adverse selection* dan *moral hazard*, terutama dalam sektor keuangan, asuransi, dan pasar tenaga kerja. Studi dalam dokumen ekonomi publik menunjukkan bahwa kondisi seperti monopsoni dalam pasar tenaga kerja membuat pekerja tidak memiliki daya tawar yang memadai, sehingga perusahaan dapat menentukan upah yang tidak mencerminkan produktivitas sebenarnya. Kondisi ini semakin memperjelas pentingnya regulasi untuk melindungi kelompok rentan dalam pasar .

Di sisi lain, berbagai bentuk persaingan tidak sempurna, mulai dari monopoli hingga oligopoli, memberikan gambaran bagaimana pasar dapat menyimpang dari fungsi idealnya. Oligopoli misalnya, memungkinkan sedikit perusahaan besar mendominasi pasar sehingga menghambat masuknya pesaing baru. Penelitian Bushnell et al. (2008) menunjukkan bahwa pasar listrik yang direstrukturisasi sekalipun masih rentan terhadap simulasi harga oleh perusahaan besar, sebuah bukti bahwa pasar tidak sempurna sering kali memerlukan intervensi regulasi untuk menjamin efisiensi dan keterjangkauan harga bagi konsumen .

Berbagai temuan tersebut menggambarkan bahwa kegagalan pasar merupakan fenomena yang kompleks dan sering kali saling berkaitan. Ketika mekanisme pasar tidak mampu mengatasi distorsi, pemerintah memiliki legitimasi untuk masuk sebagai pengatur, penyedia, dan pengawas. Intervensi pemerintah sangat diperlukan tidak hanya untuk menangani kegagalan pasar semata, tetapi juga untuk memastikan bahwa dinamika ekonomi berjalan sesuai dengan tujuan kesejahteraan sosial, stabilitas jangka panjang, dan keberlanjutan sumber daya. Seperti dijelaskan dalam

dokumen *MISTER Pratiwi*, peran pemerintah sebagai penyedia barang publik, pengendali eksternalitas, dan penjamin stabilitas ekonomi merupakan syarat mutlak agar perekonomian dapat beroperasi secara efisien dan inklusif .

Pada akhirnya, kegagalan pasar bukan hanya persoalan teknis dalam ekonomi, tetapi juga terkait nilai sosial, keadilan distribusi, dan perlindungan kelompok rentan. Karena itu, kehadiran pemerintah perlu dilihat sebagai elemen pelengkap dalam mekanisme pasar, bukan sebagai penghalang. Intervensi yang tepat tidak hanya memperbaiki distorsi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Kegagalan pasar muncul ketika mekanisme harga tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien dan adil. Berbagai bentuk kegagalan pasar seperti eksternalitas, barang publik, informasi yang tidak seimbang, serta persaingan tidak sempurna menyebabkan hasil pasar menjauh dari kondisi yang mendukung kesejahteraan sosial. Literatur dalam Ekonomi Publik menjelaskan bahwa tanpa campur tangan pemerintah, pasar dapat menghasilkan alokasi yang berlebihan atau justru kekurangan pada sektor-sektor tertentu yang vital bagi masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran negara dalam menata ulang interaksi ekonomi agar aktivitas yang merugikan dapat diminimalkan dan manfaat sosial dapat dimaksimalkan.

Intervensi pemerintah menjadi sangat penting karena negara tidak hanya bertindak sebagai penyeimbang pasar, tetapi juga sebagai penyedia barang publik, pelindung lingkungan, pengatur distribusi pendapatan, serta penjamin stabilitas ekonomi. Dokumen yang Anda unggah menunjukkan bahwa berbagai kebijakan publik dibutuhkan untuk mengatasi distorsi pasar yang tidak dapat diatasi oleh mekanisme pasar itu sendiri, seperti penanganan eksternalitas, kontrol terhadap monopoli, hingga penyediaan pelayanan publik yang esensial. Tanpa intervensi, ketimpangan ekonomi dan ketidakstabilan sosial berpotensi meningkat dan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah memerlukan instrumen yang efektif yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal digunakan untuk mengatur belanja dan penerimaan negara guna memengaruhi tingkat permintaan agregat dan distribusi pendapatan. Sementara itu, kebijakan moneter berfungsi mengendalikan suku bunga dan jumlah uang beredar untuk menjaga stabilitas harga. Kedua instrumen ini menjadi inti dari fungsi stabilisasi pemerintah dan memiliki peran penting dalam meredam gejolak ekonomi seperti inflasi, resesi, maupun pengangguran. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, kegagalan pasar dan dinamika ekonomi modern menunjukkan bahwa peran pemerintah tidak dapat digantikan oleh mekanisme pasar semata. Pemerintah perlu hadir dengan intervensi yang tepat, berbasis regulasi yang jelas, dan melalui kebijakan fiskal serta moneter yang terkoordinasi untuk menciptakan perekonomian yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi dapat terwujud secara lebih seimbang.

REFERENSI

- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Ekonomi Publik: Teori dan Penerapan Kebijakan Fiskal*. McGraw-Hill.
- Stern, N. (2008). The economics of climate change. *American Economic Review*, 98(2), 1–37. <https://doi.org/10.1257/aer.98.2.1>
- Wianti, L. R. (2020). *Tugas Paper Teori Governance: Intervensi Pemerintah dan Kegagalan Pasar*. Universitas Sanata Dharma.
- Auerbach, A. J., & Feldstein, M. (Eds.). (2002). *Handbook of Public Economics* (Vols. 1–4). Amsterdam: Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1573-4420\(02\)80004-5](https://doi.org/10.1016/S1573-4420(02)80004-5)
- Bator, F. M. (1958). The anatomy of market failure. *The Quarterly Journal of Economics*, 72(3), 351–379. <https://doi.org/10.2307/1882231>
- Bushnell, J. B., Mansur, E. T., & Saravia, C. (2008). Vertical arrangements, market structure, and competition: An analysis of restructured U.S. electricity markets. *American Economic Review*, 98(1), 237–266. <https://doi.org/10.1257/aer.98.1.237>
- Crawford, G. S., Lee, R. S., Whinston, M. D., & Yurukoglu, A. (2018). The economics of market power. *Econometrica*, 86(6), 1819–1833. <https://doi.org/10.3982/ECTA14919>